

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu organisasi adanya pergantian kepemimpinan adalah suatu keniscayaan, terlebih pada era demokrasi seperti sekarang. HMI sebagai organisasi kemahasiswaan islam yang sudah berusia 74 tahun, dalam kepemimpinannya juga mengalami regenerasi setiap waktu. Tepatnya pergantian pengurus besar HMI dilakukan pada forum yang dinamakan kongres. Dalam perjalanannya kongres ke-31 PB HMI di Surabaya diwarnai dengan situasi yang cukup panas di arena konggres. Dalam mekanisme organisasi di HMI para peserta kongres adalah orang - orang yang ditunjuk sebagai utusan dari masing - masing cabang HMI di seluruh Indonesia. Dalam hal ini HMI memakai model pemilihan electoral vote bukan popular vote, mengingat kader HMI yang cukup besar sehingga pemilihan ketua umum PB HMI dilakukan dengan perwakilan atau utusan. HMI sebagai organisasi kemahasiswaanislam di Indonesia sampai pada hari ini memiliki 20 Badan koordinasi, yang mana BADKO merupakan perpanjangan tangan pengurus pusat organisasi yang ada di wilayah provinsi dan 231 cabang. Dengan ini bisa kita dapat angka peserta konggres kurang lebih 441 peserta penuh. Tentunya jumlah utusan masing - masing cabang didasarkan pada data jumlah kader dari masing - masing cabang tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam buku pedoman keorganisasian dalam HMI, bahwa setiap cabang yang memiliki anggota 300 – 900 memperoleh satu utusan, 901 – 2.700 memperoleh dua utusan, 2.701 – 8.100 memperoleh tiga utusan dan 8.101 – 24.300 memperoleh empat utusan¹.

Walaupun tidak selalu ada permainan elit di dalam mekanisme pemilihan model perwakilan, tetapi potensi itu tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini bisa dikatakan pola permainan elit tidak memerlukan mobilisasi massa yang begitu besar. Cukup hanya memegang peserta utusan dari cabang - cabang yang akan

¹ Hasil-Hasil Kongres HMI XXXI. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021 – 2023. Hal 68.

menjadi peserta kongres saja. Kita bisa melihat molornya kongres tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor di lapangan yang merujuk pada kericuhan peserta saja. Adanya peran elit politik tertentu dalam menentukan proses berjalannya forum kongres menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian fenomena pelimpahan suara kepada beberapa calon kandidat, juga menjadi salah satu indikator bahwa kongres HMI adalah permainan para elit. Mengingat yang akan melakukan pelimpahan bukanlah kandidat yang bersangkutan, melainkan mentor yang sudah melakukan komunikasi politik di balik panggung politik. Bila kita melihat secara umum, esensi dari kongres dalam suatu organisasi adalah pergantian kepemimpinan, begitu juga sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pengurus sebelumnya dalam menjalankan organisasi tersebut. Mekanisme tersebut dilakukan dengan sidang pleno satu sampai tiga. Setelah dilakukan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan maka, selanjutnya yang dilakukan pada sidang pleno keempat adalah proses pemilihan calon kandidat yang akan menjadi pemimpin organisasi.

Proses pemilihan tentu pada umumnya, dilakukan dengan proses menilai dan menimbang kapasitas seorang kandidat calon pemimpin. Dimulai dengan melihat visi misi, narasi dan ide besar yang dibawa suatu kandidat. Tetapi terlepas daripada itu semua, di sisi yang lain yang perlu diperhatikan adalah aspek politik yang selalu hadir dalam sebuah organisasi. Ada hal - hal yang politik dibalik itu, dimana ada pertarungan antar elit yang masing - masing memiliki basis suara dengan memegang beberapa peserta utusan kongres. Walaupun mungkin peserta kongres memiliki penilaiannya sendiri terhadap performa dan kualitas dari masing - masing kandidat, tetapi tetap saja semua keputusan ada pada elit atau mentor yang membawa mereka. Disini para peserta kongres bukan berarti tidak memiliki wewenang atau keputusan sendiri. Mereka tetap memiliki kekuasaan atas suaranya, bahkan mungkin bermanuver secara mandiri tanpa mengikuti arahan kelompok atau gerbong politik tertentu, tetapi hal ini sedikit sekali terjadi.

Disini para mentor yang ada biasanya bisa membawahi beberapa cabang, misalnya jawa timur dengan 16 cabang, yang akan dibawa oleh kelompok mentor

tertentu untuk kemudian suara yang terkumpul sebanyak 16 cabang tersebut, dibawa ketika melakukan konsolidasi politik. Dalam proses berjalannya kontestasi kongres di HMI tentu para mentor ini tidak hanya berjalan sendiri tetapi ada relasi dengan elit pemerintahan pusat maupun daerah. Seperti lembaga legislatif, eksekutif, kepolisian dan ormas maupun elit non-pemerintahan. Hal ini karena dalam proses berjalannya kongres yang ada, tentu tidak hanya murni dinamika forum saja yang dilakukan oleh peserta utusan kongres. Jadi cepat atau lambatnya setiap pleno dalam forum kongres PB HMI dipengaruhi oleh kondisi elit yang ada. Apakah elit - elit sudah sepakat untuk mempercepat, memperlambat atau membuat chaos, itu semua ada pada elit yang mengatur. Tentunya dengan agenda setting forum yang ada mencerminkan kepentingan masing - masing elit yang ada. Selama proses berlangsungnya kongres masing-masing kandidat yang maju menjadi bakal calon formatur atau ketua umum bukan merupakan pertarungan antar kandidat tetapi lebih persaingan antar elit. Walaupun dalam praktiknya tidak hanya berbicara soal persaingan antar masing-masing *stakeholder*, tetapi juga berbicara bagaimana mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Sehingga terjadi hubungan timbal balik baik dari mentor ke mentor, maupun dari mentor kepada para kandidat ketua umum.

Elit politik yang turut hadir dalam HMI tentunya menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Fenomena semacam ini terjadi karena setelah terpilihnya pengurus baru dalam organisasi PB HMI maka negara juga harus memiliki akses terhadapnya, sehingga tidak heran relasi kuasa antara elit politik dan elit organisasi memberikan hubungan yang menguntungkan, walaupun di sisi lain menimbulkan kerugian seperti sering terjadinya pecah organisasi, usaha pelengseran ketua umum, tidak responsif terhadap permasalahan sosial tertentu, dsb. Dengan ini membuktikan kuatnya pengaruh dari elit politik maupun para mentor dalam jalannya kehidupan organisasi HMI, adanya fakta tersebut membuat penelitian ini tertarik pada studi peran elite penentu dengan studi kasus kongres HMI ke-31 di Surabaya. Pandangan mengenai elit di dalam tubuh suatu organisasi, tentu berbicara mengenai bagaimana mereka mengendalikan sebuah organisasi tersebut.

Teori elit selalu menekankan pada siapa yang mengendalikan dan siapa yang dikendalikan. Intervensi elit dalam organisasi HMI secara tidak langsung membuat sebuah pola ketergantungan organisasi dengan peranan elit tersebut. Hal ini karena para kader pengurus organisasi menganggap bahwa para elit tersebut telah berkontribusi bagi organisasi. Sehingga timbal baliknya adalah para kader pengurus akan turut berkontribusi pula dalam mendorong tercapainya kepentingan elit, baik status quonya dalam organisasi maupun arahan ketika merespon kebijakan dan isu nasional.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas peranan elit dalam kontestasi organisasi HMI. Lazimnya para elit di HMI ini bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, elit formal dan kedua, elit informal. Elit formal diklasifikasikan sebagai kelompok elit yang memiliki kedudukan dalam organisasi, misalnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan para ketua bidang. Sementara elit informal biasanya seorang alumni atau senior yang memiliki kedudukan di wilayah politik dan ekonomi. Elit informal ini dalam organisasi HMI di hormati dan disegani sebagai tokoh. Elit informal memiliki peran mencari kebutuhan dana, memberikan fasilitas penunjang dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan menjadi jembatan penghubung dengan pemerintahan. Elit informal ini memiliki kekuasaan di tingkat kabupaten atau pemetintahan di atasnya, sehingga dapat dengan mudah mendapat akses dan dukungan dari pemerintahan. Oleh karena itu pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada peran elit informal dan bukan pada elit formalnya. Karena dengan menyoroti hal tersebut penelitian ini bisa mengetahui kepentingan apa yang diharapkan dari elit dan bagaimana cerminan kepentingan tersebut dalam arah gerak organisasi HMI.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran elit penentu dalam kontestasi kongres PB HMI ke-31 di Surabaya?
2. Bagaimana hubungan elit penentu dan elit politik dalam mempengaruhi jalannya kongres?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui peran elit penentu dalam kontestasi kongres PB HMI ke-31 di Surabaya. Kedua, untuk mengetahui hubungan elit politik dan peran elit penentu dalam mempengaruhi proses jalannya kongres HMI di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkaya referensi yang sudah ada khususnya pada studi elit di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Secara akademis manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam kajian ilmu politik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bagi elit politik, alumni HMI, maupun kader aktif sebagai refleksi arah gerak dan independensi organisasi kedepan. Kemudian secara metodologis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pembangunan ilmu pengetahuan.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dibentuk dalam penelitian ini sesuai kerangka rumusan masalah yang ada agar tidak melebar terhadap fokus pembahasan yang ada. Definisi konseptual yang ada ini juga memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada, sehingga definisi secara konseptual dapat dipahami sebagai berikut:

1.5.1 Pengertian Elit

Elit Dalam sebuah populasi masyarakat tentu ada kelompok - kelompok masyarakat yang memiliki keunggulannya masing - masing. Kelompok yang memiliki keunggulan inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok elit. Terminologi elit sendiri berdasarkan paparan dari teoritis elit seperti Pareto, Mosca dan Suzanne Keller adalah merupakan golongan dalam masyarakat yang

memiliki keunggulan dibanding kelompok lainnya². Dalam suatu masyarakat akan selalu ada keniscayaan terhadap entitas elit itu sendiri baik dibidang politik, ekonomi, hukum dll. Berkaitan dengan hal tersebut Ralph Miliband dengan pandangan Neo-Marxistnya berargumen bahwa para pengusaha merupakan bagian yang disebut sebagai thestate elite. Dari kelompok ini mampu mendominasi kelompok atas dan kelompok tengah, thestateelite menurut Miliband sangat dekat dengan model - model konservatif dan pro terhadap kapitalis³.

Sirkulasi elit menurut Pareto sekelompok elit yang sedang pada posisi berkuasa atau memegang kendali tidak selamanya akan berada disana⁴. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan, cepat atau lambat kelompok elit yang berkuasa akan tergantikan dengan elit yang lain. Analogi yang diambil Pareto adalah pembusukan (*decay*). Maka dalam suatu masyarakat dapat pula berlangsung demikian, hal ini lebih dikenal dengan sebutan "sirkulasi elit" Secara sederhana pergantian dari non-elit menjadi kelompok elit dan sebaliknya. Pareto juga menegaskan bahwa pergantian ini tidak hanya dari kelompok non-elit saja melainkan pergantian antar elit juga sangat mungkin. Teori elit adalah suatu teori yang memandang bahwa elit adanya entitas pengaturan dimana ada sesuatu yang *inevitable* ketika menyoal tentang kekuasaan dan negara.

Dalam perkembangannya teori elit ini memiliki beberapa cabang diantaranya pluralisme elit dengan tokohnya Martin Lipset dan Robert Dahl. Teori elit klasik dari Pareto, Mosca dan Robert Michels. Sementara teori elit kontemporer dengan tokohnya C. Wright Mills, Elit yang memiliki kuasa ini bisa dikatakan memiliki anggota yang posisinya lebih penting dari orang - orang pada umumnya. Di sini para elit memiliki porsi untuk memutuskan suatu permasalahan yang memiliki dampak besar. Mereka merupakan pemegang komando di semua tingkatan baik di masyarakat maupun di suatu organisasi. Sementara itu Putnam menjelaskan bahwa dalam kekuasaan politik terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Stratifikasi teratas

² Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov. Hal 3.

³ Ibid Hal 18.

⁴ Ibid Hal 19.

disebut sebagai kelompok pembuat keputusan. Pada lapisan ini diisi oleh orang – orang yang menduduki jabatan resmi.

Kemudian, lapisan kedua yakni kaum berpengaruh. Pada lapisan ini individu dinilai memiliki pengaruh yang kuat walaupun pengaruh tersebut sifatnya tidak langsung. Seperti mereka yang dimintai masukan dan nasihat oleh para pembuat kebijakan dan tentunya kepentingan kaum berpengaruh ini sangat diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan. Sementara, lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang turut aktif dalam kehidupan berpolitik. Sebagai contohnya menjadi anggota partai, birokrat menengah, relawan gerakan sosial, penulis. Lapisan ini sering disebut sebagai lapisan aktivis dan jumlahnya lebih banyak dari kelompok berpengaruh. Lapisan keempat adalah orang – orang yang menikmati dan menjadikan politik sebagai tontonan. Mereka ini sering disebut sebagai publik peminat politik. Hal ini dikarenakan mereka mengamati dan mengetahui para pemain dalam politik. Mereka juga mendiskusikan apa yang mereka lihat tersebut tanpa terjun ke lapangan. Lapisan kelima adalah kaum pemilih (voters), dimana kaum ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Tetapi dengan jumlahnya yang begitu banyak mereka akan berpengaruh ketika menjadi satu dalam gerakan kolektif, sehingga apabila secara individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Sementara lapisan terakhir yakni kaum yang hanya menjadi objek politik semata, di mana mereka tidak berafiliasi dan tidak memiliki pengaruh politik apapun.

Pareto memberikan pembagian tipologi elit politik menjadi tiga bagian. Pertama, elit politik yang memerintah dengan cara yang licik. Cara – cara yang licik ini tidak hanya dalam negara otoriter, tetapi juga dalam negara yang demokratis sekalipun. Kedua, elit politik yang memerintah dengan paksa, tentunya model seperti ini banyak dilakukan pada negara yang menganut paham komunis dan otoriter. Ketiga, elit politik tipe konservatif. Di mana elit politik berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Segala sesuatu dibuat sedemikian rupa agar mempermudah dirinya atau kelompoknya saja dalam memperoleh akses kekuasaan. Keempat, elit politik tipe liberal adalah elit yang bekerja untuk

kepentingan umum dan memberikan kesempatan seluas – luasnya pada masyarakat yang ingin berpendapat, berargumentasi dan memberikan kritik.

Dalam teori elit klasik ada beberapa perspektif kategori elit yang diberikan oleh para ilmuwan. Pertama, perspektif psikologi. Pandangan ini dikemukakan oleh tokoh teoritis elit Vilfredo Pareto. Menurutnya masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang tentu berkualitas dan kehadiran mereka sangat diperlukan pada kekuasaan sosial politik. Mereka yang mampu masuk kedalam pusaran pusat kekuasaan adalah yang terbaik dan inilah yang disebut elit. Kemampuan untuk menduduki posisi strategis dan penting tersebut di dasarkan pada atribut kemanusiaan yang melekat pada seseorang yang disebut sebagai *residues*⁵. Dalam penjelasannya konsep residues ini Pareto menggunakan konsep teori kelas pada masyarakat. *Class one*, yakni kelompok kelas yang masih bergulat pada tataran ide dan gagasan, untuk menuju kekuasaan. *Class two*, yakni kelompok kelas yang mulai masuk dalam tahap konsolidasi posisi atau Pareto menyebutnya sebagai “*the persistence of aggregates*”. Sementara *class three*, adalah kelas yang sudah menempatkan ide dan gagasan tersebut dalam sebuah tindakan atau kebijakan.

Kedua, perspektif organisasi. Mosca dan Michels adalah teoritis elit yang menurut mereka orang hanya dikelompokkan menjadi dua saja, yakni mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak memiliki kekuasaan politik. Bagi Mosca masyarakat digambarkan sebagai dua kelas penduduk. Di mana satu kelas menguasai dan satu kelas dikuasai. Mosca menekankan pentingnya “formula politik” di mana pada setiap lapisan masyarakat, elit yang memerintah selalu berusaha menemukan basis moral dan hukum bagi kekuasaannya. Michels dikenal dengan pandangannya terkait hukum besi oligarki, yang dinyatakan sebagai hukum besi dalam sejarah. Tumbuhnya oligarki semacam ini oleh Michels dalam konsepnya tentang “pikiran masyarakat”. Menurutnya mayoritas manusia adalah apatis, berjiwa budak, malas dan tidak mampu memerintah diri sendiri. Dengan adanya paksaan inilah yang kemudian muncul dengan elit oligarki.

⁵ Chalik, D. A. (2017). *Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 29

Ketiga, perspektif ekonomi. Pandangan ini dikemukakan oleh James Burnham, di mana dia sepakat dengan pola pikir marxist bahwa adanya faktor produksi yang membuat masyarakat menjadi dominan. Pada dasarnya masyarakat menurut James Brunham terikat oleh suatu kekuatan yang mampu memberi posisi dominan di kelasnya. Adanya suatu kontrol dimaknai sebagai akses untuk memperoleh kesempatan mengembangkan ekonominya.

Keempat, perspektif institusi. Pada pandangan ini dikemukakan oleh C. Wright Mills, yang menurutnya kekuasaan tidak sekedar ditentukan oleh peran tertentu saja di masyarakat. Hal ini tentu ada faktor ekonomi dan juga faktor institusi. Mills menyebutnya sebagai “the institutionallandscape” yang mana membuktikan adanya peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang mendapatkan kekuasaan puncak. Masing-masing lembaga memiliki karakteristiknya sendiri, hal ini memungkinkan seseorang dalam mencapai puncak kekuasaannya tanpa didasari oleh pertimbangan profesional, melainkan pertimbangan hirarki dan kedekatan personal. Mills berpendapat bahwa dalam beberapa kasus kenyataannya kekuasaan dikontrol oleh kekuatan lain yang memiliki kemampuan dalam melobi dan mempengaruhi kekuasaan tersebut, Mills menyebutnya “*behind men’s back*”.

1.5.2 Kekuasaan Politik

Pengertian kekuasaan yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan politik terdapat beragam pengertian. Dari sekian banyak yang diungkapkan tersebut secara umum dan diterima oleh sebagian besar kalangan adalah pengertian yang diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan. Di mana mereka mengungkapkan kekuasaan dianggap sebagai kemampuan dari pelaku untuk mempengaruhi pelaku lainnya, sehingga tingkah laku pelaku yang dipengaruhi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempengaruhi⁶. Sementara itu Robert A. Dahl melanjutkan pernyataan Kaplan dan Laswell bahwa konsep kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain.

⁶ Haryanto. (2017). *Elit, Massa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: PolGov. Hal 46

Ramlan Surbakti dalam bukunya “Memahami Ilmu Politik” menanggapi pernyataan Robert A. Dahl yang dirasa kurang lengkap, hal ini karena tidak setiap orang atau kelompok dapat mempengaruhi atau mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Ramlan Surbakti kekuasaan dapat diartikan secara umum sebagai kemampuan dalam menggunakan sumber-sumber pengaruh yang ada, untuk mempengaruhi pihak lain bertingkah laku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi⁷. Lebih spesifik lagi, berkaitan dengan kekuasaan politik adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan keputusan politik yang menguntungkan dirinya, kelompok dan masyarakat pada umumnya.

Ramlan Surbakti dalam pemaparan yang lebih lanjut berkaitan dengan sejumlah ciri hubungan kekuasaan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan sebagai hubungan antar manusia.
- b. Pemegang kekuasaan selalu mempengaruhi pihak lain.
- c. Pemegang kekuasaan bisa merupakan individu, organisasi, atau negara.
- d. Sasaran kekuasaan dapat berupa individu, organisasi atau kelompok.
- e. Pihak yang memiliki kekuasaan belum tentu memiliki kekuatan, karena bergantung pada bagaimana pihak tersebut memanfaatkan sumber – sumber kekuasaan secara efektif.
- f. Penggunaan kekuasaan mungkin akan menggunakan paksaan atau konsensus. Bisa juga menggunakan kombinasi keduanya.
- g. Kelanjutan poin keenam adalah hal ini bergantung pada tujuan yang akan dicapai. Apakah tujuannya baik atau buruk.
- h. Hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat.
- i. Umumnya kekuasaan politik mempunyai arti bahwa sumber-sumber kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
- j. Kekuasaan yang beraspek politik adalah penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi jalannya proses politik.

⁷ Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, Anggota Ikapi. Hal 72

Dengan demikian bisa konsep kekuasaan seperti ini akan menghindarkan pendapat yang mengidentikan kekuasaan dengan selalu menggunakan unsur kekerasan dan paksaan.

Adapun dimensi-dimensi kekuasaan menurut Ramlan Surbakti, sebagai berikut:

a. Potensial dan Aktual

Seseorang dinilai memiliki kekuasaan potensial jika dia memiliki sumber kekuasaan seperti lahan, harta, senjata, pengetahuan, popularitas dan status sosial. Sementara seseorang akan dinilai memiliki kekuasaan aktual, apabila dia mampu menggunakan sumber-sumber kekuasaannya secara efektif dalam kegiatan politik.

b. Konsensus dan Paksaan

Para politisi yang memandang kekuasaan dengan menekankan aspek paksaan, cenderung akan melihat politik sebagai perjuangan, dominasi, pertentangan dan konflik. Secara umum mereka akan melihat tujuan yang dicapai elit politik tidak menyangkut masyarakat secara luas, melainkan hanya sekelompok kecil masyarakat. Sementara sebaliknya para politisi yang menganut paham konsensus, akan berusaha menggunakan kekuasaan dengan memperhatikan berbagai aspek di masyarakat secara luas.

c. Positif dan Negatif

Tujuan umum dari penggunaan kekuasaan adalah jatuh pada muara penggunaan kekuasaan yang berdampak positif atau negatif. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan yang bersifat positif adalah untuk mencapai tujuan yang penting dan diharuskan. Sementara penggunaan sumber-sumber kekuasaan negatif adalah penggunaannya memiliki tujuan bisa dikatakan merugikan pihak lain.

d. Jabatan dan Pribadi

Pada masyarakat yang memiliki peradaban maju biasanya kekuasaan identik dengan jabatan formal dan terorganisir. Seperti jabatan kepala negara, perdana menteri, menteri-menteri. Sementara pada masyarakat yang

sederhana kekuasaan nampak atau tercermin dari kualitas diri seseorang. Bisa dikatakan kekuasaan berasal dari kualitas diri, asal-usul keluarga, kharismatik ataupun wahyu.

e. Implisit dan Eksplisit

Kekuasaan implisit secara sederhana adalah bentuk kekuasaan yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Sementara pada kekuasaan eksplisit pengaruhnya secara jelas dapat dilihat dan dirasakan.

f. Langsung dan Tidak Langsung

Kekuasaan langsung adalah di mana dalam penggunaan sumber-sumber kekuasaan, mampu mempengaruhi pelaksana keputusan politik secara langsung tanpa perantara. Sementara untuk penggunaan kekuasaan tidak langsung adalah ketika sumber-sumber kekuasaan digunakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau pelaksana keputusan politik, melalui perantara yang memiliki pengaruh dan akses.

1.5.3 Relasi Kuasa

Relasi kuasa (*power relation*) adalah hubungan antara kelompok satu dengan lainnya yang di dasarkan atas ideologi tertentu⁸. Kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat konflikual, sehingga dalam penerapannya perlu adanya konsensus dan legitimasi. Michael Foucault memiliki pembacaan yang berbeda mengenai kekuasaan. Pada umumnya kekuasaan identik dengan tindakan represif dan opresif, yakni dengan melakukan dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikan, dalam sebuah ruang lingkup di mana memiliki posisi yang strategis yang berkaitan satu sama lain. Karena kekuasaan itu bersifat menyebar dan meresap ke dalam seluruh jalinan hubungan sosial.

Kekuasaan bagi foucault bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara dan bukanlah sesuatu yang bisa diukur pula. Kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Jadi di mana ada relasi, di situ ada kekuasaan. Kuasa bukan secara gamblang diartikan menguasai seseorang secara fisik. Kuasa dalam artian

⁸ Aristiono Nugroho, S. T. (2016). *Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanian Di Desa Prigelan*. Yogyakarta: STPN Press. Hal 2.

sesungguhnya adalah sebuah entitas yang disamarkan dan diselubungi. Sehingga kuasa tidak lagi bekerja dengan kekuatan fisik, melainkan melalui regulasi-regulasi yang ditaati secara sukarela dalam organisasi ataupun negara.

1.5.4 Organisasi

Secara pengertian banyak diartikan oleh beberapa ahli dari berbagai sudut pandang. James D. Money menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, kepemimpinan yang teridentifikasi dan mampu bekerja bersama untuk suatu tujuan⁹. Dwight Waldo mengartikan organisasi sebagai struktur hubungan atas dasar suatu wewenang dan sifatnya tetap dalam sistem administrasi¹⁰. Tujuan dari sebuah organisasi harus merupakan representasi dari tujuan seluruh anggota organisasi. Dalam prosesnya mencapai tujuan bersama tersebut, musyawarah adalah mekanisme yang sering dipakai untuk menentukan apa yang hendak dicapai sebuah organisasi. Adapun empat karakteristik dalam organisasi, yakni:

- a. Memiliki Tujuan bersama
- b. Pembagian Pekerjaan. Dalam hal ini sangat penting untuk membagi pekerjaan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas anggotanya.
- c. Hirarki yang jelas, hirarki atau jabatan pada organisasi pada umumnya bertingkat-tingkat. Semakin tinggi jabatannya maka dia memiliki wewenang lebih besar daripada anggota lainnya. Hirarki wewenang ini juga sering disebut rantai komando.
- d. Terdapat koordinasi yang jelas. Kejelasan dalam koordinasi ini diperlukan, supaya dalam organisasi tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam menjalankan organisasi biasanya melakukan koordinasi tidaklah mudah. Hal ini karena setiap anggota memiliki sudut pandangnya masing-masing. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian juga menentukan tindakannya masing-masing. Apabila banyak tindakan anggota yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi, maka akan terjadi kekacauan. Dari sinilah tugas seorang pimpinan

⁹ Sari, E. (2006). *Teori Organisasi (konsep dan aplikasi)*. Jakarta Timur: Jayabaya University Press. Hal 1.

¹⁰ Ibid hal 1.

organisasi, dalam meminimalisir konflik dan menyelaraskan pergerakan organisasi dengan anggotanya.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Elit

Asumsi mendasar dari teori elit adalah setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori. Pertama, adanya entitas sekelompok kecil masyarakat dengan kemampuan dan keunggulan daripada yang lain. Pada taraf kelompok ini memiliki jabatan, maka disebut kelompok elit yang berkuasa. Sedangkan pada taraf kelompok unggul yang tidak memiliki jabatan, maka disebut kelompok elit yang tidak berkuasa. Kedua, merupakan kelompok masyarakat yang umum dan jumlahnya mayoritas. Mereka inilah yang kelompok yang diperintah oleh kelompok elit. Adanya keberadaan elit ini juga tentunya untuk mendapatkan tujuan tertentu. Misalnya, kesejahteraan masyarakat, peningkatan fasilitas umum dan berbagai perlindungan yang bisa dibentuk oleh para elit. Akan tetapi ada juga tujuan yang sifatnya tidak baik misalnya, memperkaya diri sendiri dan bertindak sewenang-wenang. Lapisan elit yang tidak berkuasa atau lapisan elit kedua, juga memiliki fungsinya sendiri. Lapisan elit kedua ini bisa berfungsi sebagai pengganti elit yang berkuasa apabila terjadi pergantian. Tetapi, lapisan elit kedua ini juga bisa menjadi tandingan (*counterelit*) untuk elit yang sedang berkuasa. Definisi awal Suzanne Keller mengenai elit adalah suatu minoritas yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya, mengemban tugas-tugas pokok kemasyarakatan dan menjamin kelangsungan tatanan sosial. Elit dalam masyarakat modern terus mengalami perkembangan, sehingga konsep penjelasannya tidak hanya berputar pada kelas penguasa, raja dan aristokrasi saja¹¹.

Teori elit pada era modern ini telah mengalami berbagai modifikasi. Pertama, konsep elit dan non-elit dibuat dengan lebih jelas dan lebih bebas nilai. Kedua, prinsip utama teori elit adalah dalam masyarakat yang besar terutama negara-negara yang modern dan kompleks, kekuasaan puncak terkonsentrasi di

¹¹ Hartman, M. (2007). *The Sociology of Elites*. New York: Routledge. Hal 32 – 33.

tangan para elit. Kekuasaan pada seluruh masyarakat mengalir secara dominan dari atas ke bawah. Teori elit kemudian hadir menjadi dua versi yakni: neo-elitisme yang dekat dengan perspektif Mosca dan Pareto dan demo-elitisme yang dekat dengan perspektif Weber dan Schumpeter. Neo-elitisme menekankan akan pentingnya otonomi elit. Hal ini memungkinkan pemusatan kekuasaan yang tak terhindarkan di tangan elit. Sementara demo-elitisme menyoroti terkait dengan aliansi dan hubungan timbal balik antara kelompok elit dan non-elit. Hubungan timbal balik ini bersifat top-down dan bottom-up. Demo-elitisme ini secara tidak langsung memberikan penjelasan bahwa, teori elit modern bersifat kompatibel dengan demokrasi.

1.6.2 Elit Penentu

Elit penentu ini menjadi penghubung antara masyarakat dengan elit – elit lainnya. Sementara, asal-usul dari elit penentu terdapat pada keadaan semua kelompok-kelompok yang berkuasa. Hal ini berada pada masyarakat heterogen dalam segi usia, jenis kelamin, ras dan asal-usul kelas sosial terletak dalam pembagian kerja dalam masyarakat. Masyarakat modern yang lebih maju dalam teknologi dan diferensiasi internal itulah yang menimbulkan elit penentu.

Elit yang ada dalam masyarakat yang sifatnya sebagai elit penentu, tentu terdapat sesuatu yang melahirkannya. Menurut Suzanne Keller, elit penentu adalah suatu bentuk kristalisasi dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari kelas-kelas penguasa¹². Suzanne Keller juga membagi elit menjadi kelompok elit yakni:

1. Kasta Penguasa

Kasta penguasa disini adalah orang-orang penting yang dapat menghasilkan para tokoh atau elit melalui pembinaan dalam hal reproduksi biologis atau keturunan. Kasta penguasa ini juga merupakan model yang terpisah dari agama, bahasa, daerah, kerabat dan jabatan ekonomi.

2. Kelas Penguasa

¹²Keller, S. (1984). *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV. Rajawali hal 39.

Elit kategori ini merupakan bentuk kepemimpinan sosial yang berbentuk lapisan tunggal dalam masyarakat yang dibebani berbagai tugas sosial. Pembentukan elit ini dengan berbagai cara termasuk keturunan juga memberikan kesempatan meneruskan kelas ini.

3. Aristokrasi

Dalam kategori ini elit menguasai fungsi-fungsi sosial dan elit kategori ini terbentuk dari ikatan keluarga melalui kekerabatan dan kekayaan. Kaum aristokrat lebih menyukai jabatan politik dan perang tetapi hal ini tidak ditentukan menurut keturunan.

4. Estate Pertama

Dalam kelas ini berhubungan dengan suatu lapisan masyarakat yang sistem politiknya terpusat. Untuk mencapai lapisan ini jalur yang ditempuh selain dengan keturunan juga usaha perbuatan masing-masing individu atau kelompok, dalam artian status ini bisa hilang atau diperoleh.

5. Elit Penentu

Dalam tipe kepemimpinan ini beberapa lapisan sosial yang menjadikan seseorang pada posisi sosial yang terkemuka. Mereka dibebani oleh tugas-tugas sosial dan dibentuk dengan cara yang sesuai dengan tugas mereka. Pertimbangan untuk mencapai status elit tidak didasarkan atas jenis kelamin, ras, agama dan kesukuan saja. Status elit didapatkan dengan kompetensi khusus yang dimiliki individu. Adanya keragaman elit ini karena masing-masing elit memiliki spesialisasinya masing-masing. Elit penentu karena memiliki keistimewaan sendiri sering mampu menghubungkan dengan masyarakat karena tidak ada batasan kasta atau batasan lainnya. Fungsi dari elit penentu ini sendiri dijelaskan Suzanne Keller sebagai penguasa atas masyarakat di mana elit adalah sosok yang unggul dengan status maupun kekuasaan. Secara empiris manusia memiliki keterbatasan tetapi para pemimpin ini dituntut untuk menjalankan banyak peran sosial. Elit penentu juga dikategorikan sesuai kecenderungannya dalam memperhatikan problem internal dan eksternal bagi sistem sosial maupun organisasi yang

bersangkutan. Elit pencapai tujuan biasanya dipilih oleh seseorang yang ini mencapai sebuah tujuan di masa depan.

1.6.3 Fungsi Elit Penentu

Fungsi elit dalam segi fungsi sosial adalah fungsi keterwakilan. Tetapi Suzanne Keller menjelaskan yang mana fungsi elit merupakan kelompok yang unggul dalam status dan kekuasaan. Secara fungsional masyarakat perlu akan adanya kepemimpinan. Mereka yang melaksanakan banyak fungsi dan peran sosial, yang mana ini merupakan kenyataan sosiologis. Dengan menggunakan model sistem sosial dari Talcott Parsons, elit terbagi dalam empat macam. Pertama, elit dalam hubungan pencapaian tujuan, elit ini menata usaha untuk mencapai tujuan sosial secara umum. Kedua, elit adaptasi. Elit ini mengembangkan alat di mana untuk mencapai sebuah tujuan. Ketiga, Elit integratif yang berfungsi menyalurkan ukuran moral yang bersifat umum. Keempat, elit yang mempertahankan pola yang mana elit ini mencerminkan moral umum dari sebuah masyarakat¹³.

Elit penentu juga dibedakan berdasarkan kecenderungan mereka dalam memperhatikan permasalahan sosial baik dari internal maupun eksternal. Elit integratif adalah elit yang mempertahankan pola sosial tertentu, yang memusatkan pada permasalahan internal menyangkut tingkah laku moral dan aspirasi individu. Sedangkan untuk elit pencapaian tujuan, dilihat sebagai elit yang memperhatikan permasalahan eksternal seperti yang berhubungan dengan dunia luar dan rencana untuk masa depan. Elit yang terakhir berfungsi pada penekanan aspek – aspek instrumental dengan tanggung jawab secara terorganisasi.

1.6.4 Tujuan dan Tanggung Jawab Elit

Elit pencapaian tujuan biasanya dipilih, elit pencapaian tujuan biasanya diangkat, sementara elit yang berfungsi mempertahankan pola dipilih berdasarkan dari kesukaan orang banyak dan elit integratif tidak mengikuti pola tertentu. Dinilai dari segi tertentu mengenai bertahannya elit penentu dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial, maka elit tidak akan pernah mati secara menyeluruh.

¹³ Ibid hal 128

Sehingga mereka hidup dalam ingatan orang-orang, bangsa-bangsa dan bertahan secara simbolik.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana proses yang mempengaruhi kehidupan organisasi dalam tubuh HMI. Penentuan keputusan penting, pengambilan arah gerak organisasi dan kandidasi dalam kontestasi semuanya dipengaruhi oleh sikap elit. Penelitian ini juga diupayakan bagi peneliti dan pembaca untuk mengetahui motif kepentingan dari elit yang ada.

1.7.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa tahapan dan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis pada bagian bab III. Unit analisis ini tentunya akan menjadi mekanisme dalam pengolahan data yang diperoleh. Penelitian dengan judul “Peran Elit Penentu Dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): Studi Kasus Kongres HMI KE-31 Di Surabaya”. Yang dalam kacamata penulis memiliki sudut pandang studi elit. Unit analisis dapat diartikan sesuatu yang menjadi fokus penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan agar validitas dari sebuah penelitian dapat terjaga. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individual. Yang mana individual di dalam penelitian ini adalah elit politik, mentor pejabat publik dan alumni HMI.

1.7.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Peran Elit Penentu Dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI): Studi Kasus Kongres HMI KE-31 Di Surabaya”, ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tentunya merupakan rangkaian dari prosedur yang bertujuan mendapatkan data yang sifatnya deskriptif dari objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif juga merupakan bentuk penerjemahan dari analisis sikap dan perilaku politik yang tentunya tidak diperoleh dari penelitian kuantitatif. Dimana penelitian ini menjelaskan data dari hasil temuan pada literature yang digunakan oleh penulis

dan kejadian di lapangan yang ada, dari sumber – sumber primer melalui wawancara pelaku langsung maupun sumber sekunder dalam buku maupun sumber lain untuk menggambarkan keadaan di lapangan.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil pada peristiwa kontestasi kongres Pengurus Besar dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilakukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan lokasi arena kongres di gedung Islamic Center dan Asrama Haji, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

1.7.5 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah dari literatur yang ada maupun narasumber langsung. Adapun yang menjadi rujukan sebagai narasumber adalah

1. Mafa Uswanas S.IP. sebagai KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Papua Barat dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat yang masih aktif.
2. Ami Jaya Halim S.E. sebagai Sekertaris Jenderal PB HMI periode (2016-2018), beliau adalah pengurus ketika periode kepemimpinan Ketua Umum Mulyadi dan kemudian demisioner menjadi pengurus HMI tahun 2019.
3. Firman Dwi Kriatmojo S.IP. sebagai alumni HMI komisariat FISIP dan salah satu mentor dalam tim pemenang Rayhan Ariatama pada kongres PB HMI di Surabaya.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam sumber lain yang juga menjadi sumber data seperti dokumen dan literature terkait untuk mendukung data yang diperoleh. Peneliti disini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dengan narasumber, di mana kemudian jawaban dari narasumber yang bersangkutan akan menjadi data mentah

untuk penelitian. Wawancara juga menjadi mekanisme yang cukup bagus untuk pengumpulan data apabila data sekunder kurang tersedia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya diperlukan sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dari wawancara. Teknik dalam studi dokumentasi ini bertujuan untuk menggali sumber – sumber data lainnya, yang dapat diperoleh peneliti sebagai data pelengkap. Dokumentasi ini bisa berasal dari buku, surat – surat, foto – foto selama kegiatan.

1.7.7 Jenis Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pemahaman aspek secara mendalam, terhadap sebuah masalah. Metode penelitian kualitatif dalam analisisnya menggunakan teknik analisis mendalam (indepth). Dalam artian dalam mengkaji sebuah masalah harus kasus per kasus, hal ini karena ada keyakinan dalam metode penelitian kualitatif, bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan masalah lainnya¹⁴. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya berkualitas maka harus ada data primer dan data sekunder¹⁵.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata ucapan secara lisan, yang diucapkan oleh pelaku yang dapat dipercaya. Tentu, dalam hal ini adalah narasumber yang berkenaan dengan variabel yang akan diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumen seperti: buku, catatan, notulensi, foto, video, ataupun objek lain yang dapat melengkapi dan memperkaya data primer.

1.7.8 Teknik Analisis Data

¹⁴Siyoto, D. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. hal 28.

¹⁵ Ibid hal 28

Menurut Moeloeng proses analisis data kualitatif dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dalam berbagai sumber. Setelah melakukan telaah data langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data. Tahapan – tahapan tersebut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana kita merangkum data – data yang ada, yakni dimana ada proses membuang data yang tidak penting. Proses reduksi ini dilakukan dengan cara abstraksi yakni usaha untuk membuat rangkuman inti. Proses reduksi data ini juga membuat data yang diperoleh selama penelitian menjadi tampilan yang lebih sederhana.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan dari suatu informasi yang memungkinkan untuk diambil penarikan kesimpulan. Hal ini karena dalam proses penelitian kualitatif data yang diperoleh berbentuk naratif. Penyajian ini dilakukan untuk melihat gambaran pada bagian tertentu atau memberikan gambaran keseluruhan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Pada bagian ini adalah tahap akhir dari penelitian dimana peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang diperoleh. Yakni kegiatan menyimpulkan makna yang diperoleh selama penelitian dan diuji kebenarannya. Proses dalam menganalisis data yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan transkrip atas hasil wawancara dan ditata dengan baik sesuai dengan urutan pertanyaan yang dibuat. Kemudian, dilakukan penyederhanaan dan pemetaan data yang disusun supaya rapi. Terakhir langkah yang dilakukan adalah menganalisis hasil temuan data dengan teori yang sudah ada dan relevan dengan fokus penelitian tersebut.